

ABSTRAK

Pers merupakan salah satu pilar demokrasi dan Pers memiliki kemerdekaan pers sebagai hak asasi manusia. Resiko dari profesi pers yang sering bersentuhan dengan publik, Pers sering dilaporkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media dan hukum pidana dijadikan instrumen penyelesaian sengketa tanpa memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hal ini dianggap sebagai penghambat kemerdekaan pers.

Penulisan hukum ini membahas 2 (dua) permasalahan. Pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap suatu pemberitaan oleh Pers yang dipandang merugikan orang atau suatu badan, dan yang kedua, bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pencemaran nama baik oleh Pers di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data primer dan sekunder serta metode penelitian analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah pertanggungjawaban fiktif dan suksesif. Sedangkan proses penyelesaian perkara pencemaran nama baik oleh Pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah dengan mekanisme hak jawab/hak koreksi ataupun mekanisme mediasi/ajudikasi melalui Dewan Pers.

Kata Kunci: *Pers, Pencemaran Nama Baik, Hak Jawab, Dewan Pers*

ABSTRACT

The Press is one of the pillars of democracy and The Press has a freedom of press as a human right. The risk of the press' profession that often in contact with the public, The Press is often reported to have committed defamation and criminal law is used as instruments of dispute resolution. This situation regarded as restricting freedom of press.

This legal writing discusses 2 (two) problems. First, how the press regulation regulate the criminal liability of the news that harms someone or institution, and the second, how the settlement mechanism of defamation by the Press in Indonesia.

The method used in this research is normative juridical, the specification of this research is analytical descriptive, the sampling method are primary and secondary data, with research method is qualitative data analysis.

The results of this research indicate that based on Act No. 40 on 1999 of Press that criminal liability of press are a fictive and successive liability. While the dispute resolution about defamation by Press based on Act No. 40 on 1999 of Press are use the correction right or through mediation or adjudication in Press Council.

Keywords: Press, Defamation, Correction Right, Press Council